



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/344/M.SM.02.00/2020
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional di Lingkungan
Sekretaris Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional

18 Juni 2020

Yth. **Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional**
di
Jakarta

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi atas respon positif usulan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, tangkas, dan profesional guna peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi dan mendukung pelayanan publik yang lebih baik.

Selanjutnya sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor : B-104/SW.01/KL.01.11/2020, perihal Permohonan Persetujuan SOTK, Evaluasi Jabatan, dan Pengalihan Jabatan Struktural Anjak dan Administrasi menjadi Fungsional, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional pada prinsipnya mengatur pengalihan jabatan administrasi dapat dilakukan melalui penyetaraan ke dalam jabatan fungsional yang dilakukan dengan pemetaan dan identifikasi jabatan yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional yang disetarakan.
2. Selanjutnya berdasarkan telaah terhadap hasil pemetaan dan identifikasi jabatan yang disetarakan, pada prinsipnya kami dapat mempertimbangkan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang Saudara usulkan, yaitu:

No	Jabatan Administrasi	Jumlah Jabatan Yang Diusulkan untuk Disetarakan	Jumlah Penyetaraan Jabatan Fungsional Yang Disetujui
1.	JPT Pratama (Eselon II)	37	0
2.	Administrator (Eselon III)	9	5
3.	Pengawas (Eselon IV)	28	26

3. Terkait usulan penyetaraan yang **tidak disetujui** pengalihannya sebagaimana dimaksud pada poin 2 dikarenakan :

a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dan Jabatan Administrasi yang saat ini diduduki oleh TNI/Polri sebagaimana diusulkan, tidak memenuhi persyaratan penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa penyetaraan jabatan dilaksanakan dengan persyaratan salah satunya adalah PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Jabatan Pelaksana (Eselon V) berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;

b. Terdapat pejabat yang sudah melewati Batas Usia Pensiun (BUP), yaitu :

No	Nama Pejabat	Jabatan Administrasi	BUP
1	Sabariyanto	Kasubbag TU Sahli Bagian TU dan Protokol Biro Umum	1 April 2020

c. Terdapat beberapa jabatan yang perlu disesuaikan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pejabat	Jabatan Administrasi	JF yang Diusulkan	JF Rekomendasi Menpan
1.	Yadi Kurniawanto, ST	Kabag Keuangan Biro POK	Pranata Keuangan APBN Ahli Madya	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya

No	Nama Pejabat	Jabatan Administrasi	JF yang Diusulkan	JF Rekomendasi Menpan
2.	Zainuddin	Kasubbag Verifikasi Bagian Keuangan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	Pranata Keuangan APBN Ahli Muda	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
3.	Sutawijaya	Kasubbag Barang Milik Negara Bagian Perlengkapan Biro Umum	Penata Laksana Barang Ahli Muda	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
4.	Deviana Oktoria, S.Sos	Kasubbag Hukum Bagian Kepegawaian dan Hukum Biro Umum	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Analisis Kepegawaian Ahli Muda
5.	Mutia Tri Yuliyati, S.E.	Kasubbag Pengadaan Bagian Perlengkapan Biro Umum	Penata Laksana Barang Ahli Muda	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
6.	Susi Amiliawaty, S.Ikom	Kasubbag Perbendaharaan Bagian Keuangan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	Pranata Keuangan APBN Ahli Muda	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
7.	Suntama	Kasubbag Rumah Tangga Bagian Perlengkapan Biro Umum	Penata Laksana Barang Ahli Muda	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda
8.	Eka Puji Astuti, A.Md	Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan Bagian Keuangan Biro POK	Pranata Keuangan APBN Ahli Muda	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda

4. Perlu pula kami informasikan bahwa surat persetujuan ini merupakan pertimbangan untuk mengangkat dan melantik pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam **jabatan fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kedudukan** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sebagai tindak lanjut setelah pejabat administrasi tersebut dialihkan ke dalam jabatan fungsional, agar dilakukan langkah-langkah:
 - a. Melakukan penataan organisasi dan pola kerja;
 - b. Melakukan penataan formasi dan peta jabatan;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi serta pola karier pejabat fungsional;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pejabat yang disetarakan;
 - e. Menyampaikan laporan dan dokumen Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional yang disetarakan kepada Kementerian PANRB, instansi pembina jabatan fungsional, dan BKN;
 - f. Menyampaikan Rekomendasi Pejabat yang Berwenang terkait data Jabatan Administrator (Eselon III) yang BUP nya kurang dari 1 (satu) tahun kepada Kementerian PANRB dan BKN.
6. Dalam kaitan dengan penataan organisasi dan pola kerja, maka dalam rangka mendukung percepatan penyederhanaan birokrasi, kiranya Dewan Ketahanan Nasional dapat mengusulkan penataan organisasi dan tata kerja kepada Menteri PANRB sesuai peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

a.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Sekretaris Kementerian,



Dwi Wahyu Atmaji

Tembusan:

1. Menteri PANRB;
2. Kepala BKN; dan
3. Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB.